



Koordinasi Perencanaan Sektoral Dan Regional Dalam Perencanaan Infrastruktur Pariwisata Di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Bukit Lawang Kabupaten Langkat Sumatera Utara

Imanda Isra Andini ¹⁾; Mohammad Ridwan ²⁾

¹⁾Student of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra

²⁾ Lecturer of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra

Email: ¹⁾ imandaisra01@gmail.com ; ²⁾ mohd.ridwan@usu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [11 November 2022]

Revised [30 November 2022]

Accepted [15 Desember 2022]

KEYWORDS

Coordination, Planning
Infrastructure, Tourism, Bukit
Lawang

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan dengan baik akan memberikan pengaruh pada sektor ekonomi serta mendorong pembangunan untuk sektor-sektor lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Koordinasi Perencanaan Sektoral Dan Regional Dalam Perencanaan Infrastruktur Pariwisata Di Kawasan TNGL Bukit Lawang Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi serta dokumentasi dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi Perencanaan Sektoral Dan Regional Dalam Perencanaan Infrastruktur Pariwisata Di Kawasan TNGL Bukit Lawang Kabupaten Langkat Sumatera Utara belum berjalan optimal. Hal tersebut karena masih belum maksimalnya infrastruktur pariwisata dalam pengembangan pariwisata Bukit Lawang saat ini.

ABSTRACT

The development of the tourism sector that is carried out properly will have an impact on the economic sector and encourage development for other sectors. This study aims to determine and describe the Coordination of Sectoral and Regional Planning in Tourism Infrastructure Planning in the Bukit Lawang TNGL area, Kabupaten Langkat, North Sumatra. The research method used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques were carried out through interviews and observations as well as documentation and literature. The results showed that the Coordination of Sectoral and Regional Planning in Tourism Infrastructure Planning in the Bukit Lawang TNGL area, Kabupaten Langkat, North Sumatra has not run optimally. This is because the tourism infrastructure is still not optimal in developing Bukit Lawang tourism at this time.

PENDAHULUAN

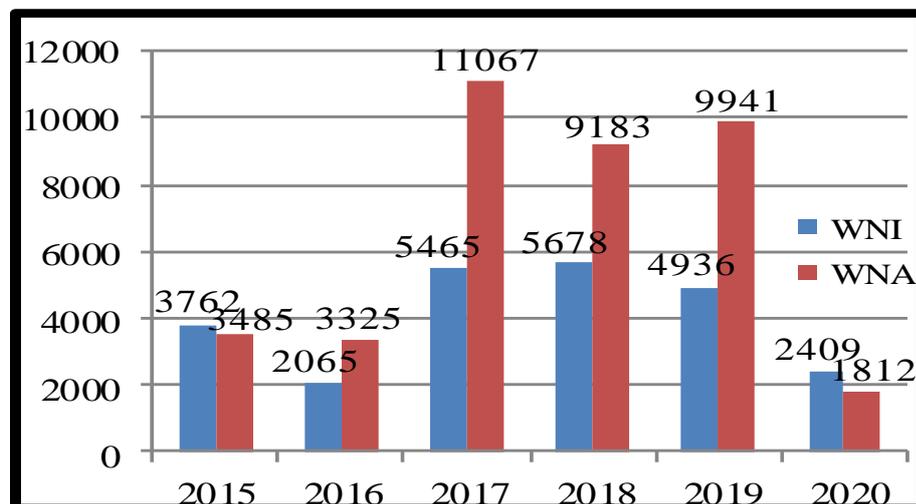
Sektor pariwisata merupakan salah satu prioritas pembangunan dari Sumatera Utara dan fokus pemerintah dalam meningkatkan akselerasi kinerja pada sektor pariwisata. Adanya perencanaan bagi pemerintah pariwisata akan mempermudah dalam mengkomunikasikan gagasan, maksud dan tujuan pengembangan pariwisata pada masyarakat dan stakeholder lainnya dengan melakukan koordinasi bagi pihak yang terlibat dalam pemerintahan seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Handayani (2017:88) mengatakan bahwa adanya ketergantungan adalah pemicu terjalannya kerjasama antara bagian-bagian yang berbeda. Perlunya memberikan sumbangan usaha yang maksimal, serta penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda dalam koordinasi menjadi tindakan yang mutlak diperlukan guna mencapai tujuan bersama. Suatu penataan dan pengembangan potensi pariwisata di Sumatera Utara diketahui mengalami penurunan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun yang disebabkan oleh kasus pandemik Covid-19. Salah satu objek wisata yang ikut mengalami penurunan di Sumatera Utara adalah wisata Bukit Lawang yang terletak Kecamatan Bohorok, Kabupaten Langkat dan biasa dikenal dengan keberadaan Orangutan Sumatera (Pongo Abelli) di wilayah Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Bukit Lawang disebut sebagai tujuan wisata yang menarik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 terkait Kabupaten Langkat disebutkan bahwa Bukit Lawang merupakan salah satu tujuan wisata prioritas yang ada di Kabupaten Langkat.

Tabel 1 Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Langkat

Wisatawan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Domestik	47.139	13.715	22.604	88.437	89.728
Mancanegara	3.495	4.885	8.396	11.667	11.672
Jumlah	50.634	4.885	31.000	100.104	101.400

Sumber: Kabupaten Langkat Dalam Angka, 2019

Berdasarkan data di atas menunjukkan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Langkat cenderung fluktuatif, dengan tahun 2016 sebagai tahun yang paling sedikit mendatangkan wisatawan yang didominasi oleh wisatawan domestik. Peningkatan wisatawan paling signifikan terjadi dari tahun 2017 ke tahun 2018. Sedangkan jumlah wisatawan mancanegara ke Kabupaten Langkat cukup tinggi, tahun 2017 wisatawan mancanegara memiliki kontribusi melebihi 30% terhadap total wisatawan, yang kemudian naik menjadi 11% pada tahun 2018. Sejumlah pariwisata Indonesia mengalami tingkat wisatawan baik lokal ataupun mancanegara yang menurun drastis karena Covid-19 begitupun terjadi pada wisata Bukit Lawang Sumatera Utara.

**Gambar 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Bukit Lawang Tahun 2015-2020**

Sumber: Master Plan Pengembangan Wisata Alam TNGL (Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan RI serta Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser), 2020

Berdasarkan data di atas menunjukkan dimana wisatawan yang tercatat berkunjung pada tahun 2020 untuk WNI menjadi sebanyak 2.409 orang, jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 4.936 orang. Sedangkan untuk WNA tercatat sebanyak 1.812 orang, dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 9.941 orang.

Penelitian ini berfokus pada perencanaan infrastruktur pariwisata Bukit Lawang yang akan dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektoral dan regional yang efektif antar pihak-pihak yang terkait salah satunya BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara. Menurut Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara pada pasal 2 ayat (2), yaitu “melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, dan statistik”. Oleh karena itu, BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara merupakan organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki kewenangan atau mandat melaksanakan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan pada tingkat organisasi pemerintah daerah.

Teori yang peneliti gunakan sebagai pemandu ialah teori koordinasi dari Handayaniingrat. Koordinasi dapat diartikan usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda, agar kegiatan



daripada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar diperoleh hasil secara keseluruhan, di mana koordinasi memiliki 5 (lima) indikator yang dapat diukur melalui, komunikasi; kesadaran pentingnya koordinasi; kompetensi partisipan; kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi, dan kontinuitas perencanaan. Terkait dengan koordinasi perencanaan infrastruktur pariwisata, penulis mengemukakan permasalahan seperti koordinasi perencanaan sektoral dan regional dalam perencanaan infrastruktur pariwisata di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Bukit Lawang Kabupaten Langkat Sumatera Utara yang belum efektif dimana secara sektoral dimaksudkan terhadap BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara sedangkan secara regional dimaksudkan terhadap BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara dengan BAPPEDA Kabupaten Langkat beserta masyarakat dan pelaku usaha pariwisata di wilayah Bukit Lawang.

Hal lainnya ditemukan pada RIPPARDA Kabupaten Langkat tentang permasalahan yang menyangkut infrastuktur jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki yakni di antaranya terjadi di beberapa ruas jalan di Padang Cermin ± 2 km, jalan rusak sebelum Salapian ± 1 km, dan jalan rusak dari Terminal Gotong Royong ke Gerbang Objek Wisata Bukit Lawang ± 2 km, jalan setapak menuju ke Gua Batu Rizal dan Gua Batu Kapal, lalu beberapa ruas jalan menuju objek wisata Tangkahan. Aksesibilitas menuju Bukit Lawang sudah terbilang cukup baik. Sarana transportasi cukup memadai, sepanjang jalan menuju Bukit Lawang sudah di aspal namun terdapat kerusakan jalan pada ruas Kuala-Sp. Marike sepanjang ± 4 km.

Peneliti juga menemukan permasalahan lain, yaitu beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi langsung terkait infrastruktur pariwisata di Bukit Lawang Sumatera Utara diantaranya, akses jalan dan jembatan menuju objek wisata rusak berat, tidak terdapat penerangan jalan dan rambu petunjuk jalan kurang pada jalan Provinsi menuju objek wisata, tidak terdapat fasilitas persampahan, dan lemahnya jaringan internet pada kawasan wisata Bukit Lawang.

Pada dasarnya masalah koordinasi yang dimaksud dikarenakan koordinasi dan kerjasama antara pusat dan daerah yang belum maksimal dalam penyediaan infrastruktur dasar untuk memperkuat pembangunan pariwisata melalui peningkatan akses jalan, jembatan, air bersih, jaringan telekomunikasi, listrik dan sistem pengendalian dan pemeliharaan lingkungan, tanpa melakukan perusakan lingkungan itu sendiri di dalamnya. Kemudian terjadi pelemahan indikator koordinasi perencanaan pembangunan yang tidak berjalan dengan maksimal, seperti rendahnya tingkat komunikasi dalam berkoordinasi, kurangnya tingkat kesadaran para implementor, koordinator dan pelaksana dalam perencanaan. Dikarenakan masih rendahnya kompetensi dalam berkoordinasi sesuai komitmen yang telah disepakati, dan permasalahan insentif kerja yang belum sesuai harapan menyebabkan kontinuitas perencanaan belum optimal.

LANDASAN TEORI

Teori yang peneliti gunakan sebagai pemandu ialah teori koordinasi dari Handyaningrat (2017:88). Koordinasi dapat diartikan usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda, agar kegiatan daripada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar diperoleh hasil secara keseluruhan, di mana koordinasi memiliki 5 (lima) indikator yang dapat diukur melalui, komunikasi; kesadaran pentingnya koordinasi; kompetensi partisipan; kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi, dan kontinuitas perencanaan. Sedangkan, dalam urusan publik, koordinasi dianggap penting karena sebuah organisasi tidak mungkin menyelenggarakan tugasnya tanpa bantuan dari organisasi lainnya. Dijelaskan Awaluddin Djamin (dalam Hasibuan, 2011:86) koordinasi merupakan suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi.

Menurut Ridwan (2012:3), perencanaan merupakan suatu proses upaya untuk mengubah kondisi saat ini yang tidak sesuai lagi dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan menuju ke kondisi yang lebih baik atau sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Sedangkan, menurut Inskeep (dalam Ridwan 2012:4) menjelaskan perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis dan rasional kegiatan-kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan merupakan

suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada secara lebih efektif dan efisien.

Menurut Wahab (dalam Yoeti, 1995:107) pariwisata adalah “*A proposeful human activity that serve as a link between people either within one some country or beyond the geographical limits or state. It involves the temporary displacement of people to other region, country, for the satisfaction of varied needs other than exciting a renumareted function*”. Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri atau di luar negeri (meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain) untuk mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya dimana ia memperoleh pekerjaan tetap.

Terkait dengan koordinasi perencanaan infrastruktur pariwisata, penulis mengemukakan permasalahan seperti koordinasi perencanaan sektoral dan regional dalam perencanaan infrastruktur pariwisata di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Bukit Lawang Kabupaten Langkat Sumatera Utara yang belum efektif dimana secara sektoral dimaksudkan terhadap BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara sedangkan secara regional dimaksudkan terhadap BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara dengan BAPPEDA Kabupaten Langkat beserta masyarakat dan pelaku usaha pariwisata di wilayah Bukit Lawang.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci (Sugiyono dalam Pasolong 2016:161). Dengan demikian, penelitian ini akan menjelaskan gambaran realita dari masalah dengan menggunakan data-data yang ada. Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Jl. Pangeran Diponegoro No.21 A, Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Sumatera Utara. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara untuk informasi yang akurat, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan penelitian. Adapun kriteria informan penulis ialah BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, BAPPEDA Kabupaten Langkat, pelaku usaha dan masyarakat. Dengan demikian, penulis memilih Kepala BAPPEDA Sumatera Utara, Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam BAPPEDA Sumatera Utara, Kepala Sub Bidang Ekonomi BAPPEDA Sumatera Utara, Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA Kabupaten Langkat, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumatera Utara, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara, pelaku usaha pariwisata dan masyarakat selaku sasaran dan informan dalam penelitian ini. Setelah informasi dikumpulkan, maka penulis akan melakukan analisis data dengan teknik analisis yang dilakukan secara interaktif, yaitu dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Sementara untuk teknik keabsahan data, penulis menggunakan triangulasi data, dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara antar subjek penelitian yang satu dengan yang lain, kemudian membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan dokumentasi sehingga memperoleh suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koordinasi dalam perencanaan pembangunan pada hakikatnya adalah upaya untuk menyerasikan dan menyelaraskan aktifitas-aktifitas pembangunan tertentu yang dilaksanakan oleh berbagai pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Koordinasi hendaknya diterapkan dalam keseluruhan proses pembangunan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sampai dengan evaluasinya. Terjadinya tumpang tindih, ketidakpahaman dalam melaksanakan tugas-tugas merupakan pertanda kurang sempurnanya pelaksanaan koordinasi. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut dibutuhkan usaha dari antar instansi sebagai upaya yang dapat dilaksanakan melalui koordinasi lintas



sektoral dan regional dalam perencanaan infrastruktur pariwisata di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Bukit Lawang Kabupaten Langkat Sumatera Utara dengan melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat bersama masyarakat dan pelaku usaha di Bukit Lawang itu sendiri.

Peneliti telah mengamati permasalahan yang ditemukan, berdasarkan hasil di lapangan masalah yang terjadi di antaranya ialah infrastruktur menuju lokasi wisata Bukit Lawang dan infrastruktur di lokasi wisata Bukit Lawang. Selanjutnya, peneliti mengkaji koordinasi perencanaan infrastruktur lintas sektoral dan regional yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara berdasarkan indikator komunikasi; kesadaran pentingnya koordinasi; kompetensi partisipan; kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi, dan kontinuitas perencanaan dari Handyaningrat (2017:88).

Infrastruktur Menuju Lokasi Wisata

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, adanya masalah menyangkut dengan infrastruktur akses jalan yang rusak dan perlu diperbaiki menuju destinasi wisata Bukit Lawang yang merupakan jalan Provinsi bukan milik Kabupaten Langkat. Hampir di sepanjang perjalanan menuju wisata Bukit Lawang mengalami kerusakan dan berlubang. Oleh sebab itu, apabila memasuki musim kemarau akan membuat jalan berabu sehingga sering membuat wisatawan mengeluh terutama wisatawan lokal dan membuat kurangnya minat wisatawan lokal untuk berkunjung lagi terutama bagi pengendara sepeda motor. Jika memasuki musim penghujan kondisi jalan semakin buruk dimana terdapat kondisi jalanan becek dan licin akibat saluran air di jalan menuju parit yang tidak lancar. Kemudian, masih kurangnya rambu-rambu lalulintas dari dan menuju objek kawasan wisata Bukit lawang seperti kurangnya lampu dan tanda jalan sebagai petunjuk arah dan peringatan.

Hambatan lainnya di karenakan jalan menuju destinasi wisata Bukit Lawang bukanlah milik pemerintah Kabupaten Langkat melainkan jalan pemerintah Provinsi, sehingga untuk melakukan perbaikan di haruskan untuk membuat proposal terlebih dahulu agar Pemerintah Provinsi mengeluarkan anggaran dana untuk perbaikan jalan menuju destinasi wisata Bukit Lawang, namun hal ini biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menyatakan benar bahwa memang ditemukannya permasalahan terkait akses jalan yang mengalami kerusakan cukup parah sehingga membuat warga dan para wisatawan resah dan mengalami kesulitan.

Dari observasi penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwasanya masih kurangnya kesadaran yang diberikan pemerintah Sumatera Utara sebagai yang memiliki kewenangan untuk menangani permasalahan tentang akses jalan ini. Permasalahan ini seharusnya dapat ditangani secara cepat agar kondisi akses jalan yang dialami ini tidak terjadi berlarut-larut. Dalam kewenangannya, pemerintah Sumatera Utara yakni BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara harus mengarahkan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera untuk melakukan sejumlah perbaikan akses jalan yang ada di Sumatera Utara, termasuk akses jalan menuju wisata Bukit Lawang.

Pemerintah Sumatera Utara menjadikan prioritas pada pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 450 km. Perencanaan ini membutuhkan anggaran sebesar Rp 2,7 triliun yang akan dimulai tahun ini dan akan ditargetkan sudah rampung pada tahun 2023. Sementara itu, Pemerintah Sumatera Utara pada tahun lalu telah berencana memperbaiki ruas jalan menuju kawasan wisata Bukit Lawang. Namun, rencana itu harus batal karena pandemi *Covid-19* dan membuat Pemerintah Sumatera Utara harus melakukan *refocusing* anggaran. Karena *refocusing* anggaran tersebut, maka tahun 2021 tidak ada alokasi anggaran ruas jalan dari Binjai menuju Bukit Lawang.

Infrastruktur di Lokasi Wisata

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, peneliti melihat bahwa infrastruktur terkait akses jalan di lokasi Bukit Lawang sudah memenuhi syarat untuk di akses dan sudah cukup baik karena di sepanjang jalan menuju wisata Bukit Lawang telah di aspal. Hal tersebut dikarenakan adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Langkat yang selalu memerhatikan lokasi wisata Bukit Lawang dan menjadikannya prioritas pembangunan sebagai pariwisata yang berbasis ekowisata.

Dilihat dari fasilitas pendukung di wisata Bukit Lawang, fasilitas-fasilitas tersebut dapat dikatakan cukup memadai namun masih ada sejumlah fasilitas yang masih kurang memadai. Fasilitas yang memadai tersebut di antaranya hotel/penginapan, parkir kendaraan untuk menampung wisatawan, dan rumah makan/restoran. Sedangkan fasilitas yang tidak memadai di antaranya toilet umum, tempat sampah dan musholla. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Langkat terus mengembangkan dan memberikan perhatian terhadap fasilitas yang tidak memadai.

Koordinasi di dalam organisasi publik atau instansi pemerintah pada intinya adalah untuk menyatukan segala upaya dan tindakan harmonis untuk mencapai tujuan bersama. Maka untuk mendeskripsikan “Koordinasi Perencanaan Sektoral dan Regional Dalam Perencanaan Infrastruktur Pariwisata di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Bukit Lawang Kabupaten Langkat Sumatera Utara dapat diukur melalui teori Handayani (1991:80) dengan kelima indikator koordinasi.

Komunikasi

Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya. Biasanya aktivitas komunikasi ini dilakukan secara verbal atau lisan sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Komunikasi dapat dilihat dari ada tidaknya informasi, ada tidaknya alur informasi dan ada tidaknya teknologi informasi (Handayani 1989:80).

Peneliti menemukan bahwa komunikasi yang dilakukan BAPPEDA Sumatera Utara sudah cukup efektif. Perencanaan pariwisata yang dilakukan bersifat transparan agar masyarakat dan pelaku usaha yang berada di wisata Bukit Lawang dapat mengetahui tentang apa yang direncanakan oleh pemerintah Sumatera Utara dalam membangun infrastruktur wisata yang akan segera direalisasikan. Komunikasi yang dilakukan dalam perencanaan infrastruktur pariwisata Bukit Lawang di koordinasikan melalui pertemuan secara formal dan informal yang diselenggarakan oleh pemerintah Sumatera Utara dengan melibatkan pemerintah Kabupaten Langkat sekaligus. Komunikasi secara formal dilakukan dengan mengadakan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara. Secara informal pelaksanaan koordinasi dilakukan dengan cara mengunjungi langsung lokasi wisata bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah Kabupaten Langkat, masyarakat dan pelaku usaha yang berada di Bukit Lawang.

Dari observasi yang dilakukan, peneliti menemukan bahwasannya dalam praktiknya komunikasi dapat ditempuh melalui sistem perencanaan dari bawah ke atas. Hal ini biasanya disebut dengan perencanaan partisipatif. Tahap yang paling bawah dalam rapat koordinasi pembangunan daerah akan diusulkan kepada tingkat yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, BAPPEDA Sumatera Utara dan Kabupaten Langkat dapat menggunakan teknologi sebagai fasilitas kerja untuk memperlancar komunikasi dan membagikan informasi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook ataupun website resmi BAPPEDA.

Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Sinergitas dari kesadaran pentingnya koordinasi merupakan elemen penting yang harus dimiliki oleh setiap organisasi perangkat daerah, karena tingkat pengetahuan dan ketaatan pelaksana terhadap koordinasi sangat diperlukan untuk menjamin terlaksananya kerjasama antar organisasi perangkat daerah, sebab tanpa dukungan kesadaran ini maka sinergitas tidak akan berjalan efektif (Handayani 1991:80).

Peneliti menemukan bahwa BAPPEDA Sumatera Utara melakukan koordinasi dengan memberikan pengarahannya dan menghimbau untuk melaksanakan koordinasi lintas sektoral dan lintas regional. Dalam pelaksanaan secara sektoral terdapat BAPPEDA Sumatera Utara, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara serta Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sebagai unit pelaksana yang berasal dari Provinsi. Secara regional unit pelaksana akan ditangani oleh daerah tersebut yakni BAPPEDA Kabupaten Langkat beserta masyarakat dan pelaku usaha pariwisata di Bukit Lawang itu sendiri.

Adanya kesadaran untuk berkoordinasi dengan BAPPEDA bersama masyarakat sangat penting dikarenakan masyarakat sebagai faktor utama dalam melakukan pembangunan daerah karena masyarakat bermanfaat sebagai pelengkap dalam memberikan pengetahuan, informasi dan komunikasi.



Masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan bertanggung jawab dalam mengawasi setiap daerah lokasi wisata untuk melihat sejauh mana proses pembangunan yang sudah terealisasi, sehingga hasil yang ditemukan dapat langsung dikoordinasikan kepada pihak yang bertanggungjawab.

Dari observasi yang dilakukan, peneliti menemukan bahwasannya BAPPEDA Sumatera Utara sudah menunjukkan kesadaran pentingnya koordinasi dengan melibatkan stakeholders dari pusat dan daerah beserta diikuti dengan adanya partisipasi yang berasal dari masyarakat Bukit Lawang sendiri.

Kompetensi Partisipan

Menurut Handayani (1989:80), kompetensi partisipan dalam koordinasi dapat dilihat dari ada tidaknya pejabat yang berwenang maupun yang ahli di bidang pembangunan terkait yang mengambil bagian.

Peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan perencanaan yang dilakukan dapat dilihat partisipasi yang diberikan dari masyarakat dan pelaku usaha di sana sangat antusias. Partisipasi mereka dikatakan sudah cukup aktif, baik itu dalam partisipasi langsung maupun tidak langsung. Mereka sekaligus memanfaatkan momen tersebut sebagai ajang promosi usaha mereka sehingga usaha yang mereka miliki dapat dilirik banyak wisatawan yang datang.

Dari segi pemerintahan, keterlibatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara dan masyarakat Bukit Lawang dilakukan sebagai bentuk dukungan yang diberikan lewat sosialisasi dan kampanye akan pentingnya sadar wisata dan menjaga kebersihan lingkungan di lokasi wisata Bukit Lawang. Kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan motivasi agar masyarakat dapat memanfaatkan lingkungan, informasi dan komunikasi dalam pemasaran pariwisata guna mewujudkan keberhasilan Kegiatan Strategis Daerah pada Prioritas Pembangunan Pariwisata yang merupakan bagian dari 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Sumatera Utara menuju Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat.

Dari observasi yang dilakukan, peneliti menemukan bahwasannya keterlibatan pejabat dalam perencanaan sudah ada dan sudah dalam tahap pelaksanaan, lalu para tenaga ahli juga sudah turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi daerah pariwisata tersebut.

Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi

Kompetensi partisipan di dalam indikator koordinasi mengukur apakah ada pejabat yang terlibat dan apakah ada ahli pembangunan yang terlibat dalam koordinasi perencanaan infrastruktur Bukit Lawang ini.

Peneliti menemukan bahwa dalam membentuk komitmen dalam pembangunan haruslah di mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. BAPPEDA Sumatera Utara melibatkan perangkat daerah lainnya untuk melaksanakan berbagai kegiatan perencanaan infrastruktur Bukit Lawang ini, diawali dari BAPPEDA yang berfungsi sebagai badan perencanaan, oleh karena itu dibutuhkan kerjasama yang tentunya masing-masing perangkat daerah akan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal kesepakatan, perjanjian kerjasama yang digunakan BAPPEDA Sumatera Utara untuk perencanaan pariwisata Bukit Lawang ini menggunakan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang bertujuan mensinergikan pengembangan pariwisata Bukit Lawang sekaligus mendukung program pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM yang dilakukan Wakil Gubernur Sumatera Utara, juga sebagai upaya percepatan pembangunan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha di Langkat.

Dari observasi yang dilakukan, peneliti menemukan bahwasannya pengembangan pariwisata akan lebih baik lagi secara ilmu pengetahuan apabila menggandeng Politeknik Pariwisata Medan. Kehadirannya diharapkan dapat menimbulkan kesadaran masyarakat yang lebih besar lagi atas potensi wisata di daerahnya hingga tahu bagaimana cara mengemas wisata agar lebih memikat dan bisa meningkatkan angka kunjungan pariwisata dari turis mancanegara.

Kontinuitas Perencanaan

Kontinuitas perencanaan adalah salah satu indikator koordinasi yang apabila koordinasi sudah berjalan maka perlu dilihat ada atau tidaknya *feedback* (umpan balik) dari objek maupun subjek

koordinasi tersebut, oleh sebab itu diperlukan perencanaan selanjutnya jika masalah dalam koordinasi tidak terpecahkan.

Peneliti menemukan bahwa BAPPEDA Sumatera Utara sebagai instansi yang bertanggung jawab sudah memenuhi akan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di kawasan Bukit Lawang. Pejabat publik telah merespon dengan baik atas rekomendasi yang diberikan masyarakat dan pelaku usaha kepada BAPPEDA Sumatera Utara dan Kabupaten Langkat serta *stakeholders* yang terlibat, perihal proses perencanaan infrastruktur pariwisata yang dilakukan. Kontinuitas perencanaan infrastruktur di Bukit Lawang saat ini merupakan salah satu rencana berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2020 sampai saat ini dan sudah memasuki tahap pengevaluasian oleh BAPPEDA Sumatera Utara.

Dari observasi yang dilakukan, peneliti menemukan bahwasannya masyarakat turut merasakan pengaruh positif yang diberikan oleh BAPPEDA sebagai fasilitator di Sumatera Utara. Melalui beberapa berita di media sosial, masyarakat memberikan respon positif terhadap kehadiran BAPPEDA baik dari Provinsi atau Kabupaten, walaupun pada dasarnya BAPPEDA juga menyadari bahwa mereka masih kurang maksimal selama ini.

Analisis Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Pariwisata di Kawasan TNGL Bukit Lawang Koordinasi Sektoral

Menurut Handyaningrat (1985:88), perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor. Artinya sektoral adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuannya. Pendekatan ini menentukan kegiatan tertentu, oleh instansi tertentu, di lokasi tertentu, faktor lokasi pada dasarnya dipandang sebagai tempat atau lokasi kegiatan saja.

Dalam penelitian yang dilakukan di kawasan Bukit Lawang, hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan menunjukkan koordinasi perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di kawasan TNGL Bukit Lawang dapat dikatakan belum maksimal. Perencanaan lintas sektoral dan regional yang dilakukan tidak berjalan cukup baik di antaranya karena kurangnya alokasi anggaran yang seharusnya dapat diterima lebih cepat supaya segera merealisasikan perencanaan pembangunan infrastruktur jalan Bukit Lawang. Selain itu, beberapa hal yang belum terealisasikan dengan sempurna lainnya salah satunya adalah perbaikan akses jalan menuju Bukit Lawang yang merupakan bagian jalan Provinsi, kurangnya penerangan jalan dan rambu petunjuk jalan di sepanjang jalan Provinsi menuju objek wisata.

Pada sisi perencanaannya, BAPPEDA Sumatera Utara telah mengupayakan agar berlangsung sesuai mekanisme yang telah diatur, tetapi belum bisa berjalan optimal. Karena permasalahan BAPPEDA Sumatera Utara dalam melakukan koordinasi hanyalah sebatas fasilitator bagi pelaksana kegiatan. Dalam hal ini yang memiliki kewenangan dalam melakukan tugas penanganan akses jalan tersebut ialah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara. Wujud koordinasi yang dilakukan BAPPEDA Sumatera Utara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumatera Utara telah terhadap perencanaan infrastruktur pariwisata Bukit Lawang telah dilaksanakan berupa penyusunan rencana, penyusunan program rencana, pelaksanaan program, pengawasan atas pelaksanaan program dan pengevaluasian.

Koordinasi Regional

Menurut Nugroho (dalam Sirojuzilam, 2008) menyatakan bahwa perencanaan koordinasi regional menitikberatkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan. Instansi/lembaga pusat dengan visi atau kepentingan yang bertitik berat sektoral melihat lokasi untuk kegiatan, sedangkan pemerintah daerah dengan titik berat pendekatan pembangunan regional (wilayah/daerah) melihat kegiatan untuk lokasi.

Dalam penelitian yang dilakukan, BAPPEDA Kabupaten Langkat ikut berpartisipasi dalam mewujudkan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan pariwisata yang terintegritas. BAPPEDA Kabupaten Langkat memenuhi tanggung jawabnya sebagai fasilitator bagi unit pelaksana kegiatan di kawasan wisata Bukit Lawang.

Peneliti melihat bahwa terdapat fasilitas pendukung pariwisata yang sudah memadai di kawasan wisata Bukit Lawang. Fasilitas tersebut yakni adanya hotel/penginapan, restoran/rumah makan dan parkir bagi wisatawan. Adapun fasilitas yang masih kurang memadai baik dari segi kualitas dan



kuantitasnya yakni di antaranya toilet umum yang masih terbatas dan tidak layak untuk digunakan, tempat sampah yang kurang merata, dan kurangnya tempat ibadah seperti musholla yang tersebar.

BAPPEDA Kabupaten Langkat selaku pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan daerah Bukit Lawang mengupayakan pendayagunaan ruang di daerahnya dengan berbagai kegiatan perencanaan pembangunan sehingga menghasilkan alternatif pembangunan yang terbaik bagi daerah tersebut. Pendekatan regional ini dipadukan dalam perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari pembangunan sektor-sektor di berbagai daerah, dan pembangunan daerah yang bertumpu pada sektor-sektor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara mengenai Koordinasi Perencanaan Sektoral Dan Regional Dalam Perencanaan Infrastruktur Pariwisata Di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Bukit Lawang Kabupaten Langkat Sumatera Utara masih belum terealisasi dengan baik dan belum optimal sesuai dengan indikator keberhasilan dari koordinasi. Dikarenakan lemahnya koordinasi perencanaan pembangunan yang dilaksanakan lintas sektoral maupun regional yang bersangkutan di dalamnya. Pertama, lemahnya koordinasi BAPPEDA Sumatera Utara sebagai fasilitator dan kurangnya peran Dinas Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara membuat permasalahan infrastruktur jalan ini belum dapat terealisasi dengan baik. Oleh karena itu, akses jalan Provinsi yang sampai saat ini masih menjadi masalah belum dapat ditangani dengan benar. Kedua, ditemukannya beberapa fasilitas pendukung pariwisata yang belum memadai di kawasan Bukit Lawang seperti toilet dan tempat sampah yang masih kurang, namun untuk akses jalan di lokasi wisata tersebut dapat dikatakan layak dan memenuhi syarat.

Saran

1. Seharusnya peran BAPPEDA Sumatera Utara sebagai fasilitator lebih menegaskan peran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara untuk lebih bertanggung jawab atas wewenangnya membangun infrastruktur terkait akses jalan dan untuk BAPPEDA Kabupaten Langkat lebih memprioritaskan fasilitas yang kurang memadai dan memasukkan fasilitas tersebut ke dalam perencanaan pembangunan program prioritas pariwisata
2. Seharusnya anggaran alokasi untuk infrastruktur untuk akses jalan Bukit Lawang menjadi prioritas pembangunan pemerintah Sumatera Utara dan menjadikan akses jalan wisata Bukit Lawang tersebut dianggarkan pusat kepada provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amerta, I Made Suniastha. (2019). *Pengembangan Pariwisata Alternatif*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Andini, Imanda Isra. (2022). *Koordinasi Perencanaan Sektoral Dan Regional Dalam Perencanaan Infrastruktur Pariwisata Di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Bukit Lawang Kabupaten Langkat Sumatera Utara*. Medan: USU
- Handyaningrat, Soewarno. (2017). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung
- Hidayat, Gusman., Juanda Nawawi dan Rabina Yunus. 2011. Koordinasi Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No. 2
- Pasolong, Harbani. (2016). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Penil, Andreas., Leny M. Tamunu dan Wiliam Djani. (2019). Koordinasi Lingkup Organisasi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Kota Kupang. *Journal of Business Studies*. Vol. 4, No. 2
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Utara (Ripparda Sumatera Utara 2012-2022)

Ridwan, Mohammad., Windra Aini. (2019). *Perencanaan Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata*. Yogyakarta: CV Budi Utama

Sentika, Rahmat. (2015). *Koordinasi Pengelolaan Program Jaminan Sosial*. Jakarta: Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan